

**KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MELALUI
PROGRAM “ZERO SAMPAH” DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Ayu Achriany Sopian
NPP. 31.0948

*Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: ayuachriany.72@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Herson Simbolon, M.Si

ABSTRACT

**“PERFORMANCE OF THE ENVIRONMENTAL AND FORESTRY DEPARTMENT
THROUGH THE “ZERO WASTE” PROGRAM IN POLEWALI MANDAR DISTRICT
WEST SULAWESI PROVINCE”**

Problem Statement/Background (GAP): *The amount of waste generated in Polewali Mandar Regency in 2022 is 2,852,712 from a population of 488,857.00, indicating that waste management is not good by the performance of the Environmental and Forestry Service which handles waste problems in Polewali Mandar Regency. Meanwhile PP no. 97 of 2017 Article 5 paragraph 1 concerning the National Strategy Policy for Management of Household Waste and Similar Types of Household Waste which targets the amount of waste generation at 30%.*
Purpose: *Therefore, this study aims to determine and describe the performance of DLHK through the Zero Waste program, inhibiting factors, and efforts in waste management in Polewali Mandar Regency.*
Method: *This study research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used by researchers are interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used in this thesis research consist of data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification. In accordance with Soesilo's theory in (Nogi, 2005).*
Result: *the results of this research concluded that in waste management, DLHK's performance through the "Zero Waste" Program has made a positive contribution to maintaining cleanliness. However, the implementation is not yet optimal because the number of people who participate is not directly proportional to the population in Polewali Mandar and the amount of waste collected is not directly proportional to the amount of waste generated, there are inhibiting factors such as covering the level of public awareness in disposing of waste, closed landfills, facilities and infrastructure. limited, cooperation agreements between local governments and the community, and no strict sanctions.*
Conclusion: *Therefore, it is hoped that the Polewali Mandar Regency DLHK will make efforts to improve waste management performance, such as empowering the community, creating a new landfill, increasing the budget, providing facilities and infrastructure, increasing cooperation, and providing strict sanctions for violators.*

Keywords: *Performance, Waste Management, waste generation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banyaknya timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 sebesar 2,852,712 dari jumlah penduduk 488,857,00 menunjukkan belum baiknya tata kelola persampahan oleh kinerja Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan yang menanungi permasalahan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Sementara PP No. 97

Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menargetkan jumlah timbulan sampah sebesar 30%. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja DLHK melalui program *Zero* Sampah, faktor penghambat, serta upaya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. **Metode:** Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. **Hasil/Temuan:** Sesuai dengan teori Soesilo dalam (Nogi,2005) hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sampah kinerja DLHK melalui Program "*Zero* Sampah" telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga kebersihan. Namun pelaksanaannya belum optimal dikarenakan jumlah masyarakat yang mengikuti belum berbanding lurus dengan penduduk di Polewali Mandar dan Jumlah sampah yang terkumpulkan belum berbanding lurus dengan jumlah timbulan sampah, adanya faktor penghambat yang dihadapi seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, tertutupnya TPA, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah hingga masyarakat, dan tidak ada sanksi yang tegas. **Kesimpulan:** Oleh karena itu diharapkan DLHK Kabupaten Polewali Mandar berupaya untuk mengatasi kinerja pengelolaan sampah seperti memanfaatkan pemberdayaan masyarakat, membuat TPA baru, penambahan anggaran, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kerjasama, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

Kata kunci: Kinerja, Pengelolaan Sampah, Timbulan Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan dalam masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Banyak negara maju yang telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi belum memberi dampak yang signifikan.

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan menempatkan masyarakat sebagai unsur utama dalam upaya penanggulangan sampah di lingkungan masing-masing dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 Permendagri Nomor 33 tahun 2010 yang termaktub "Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah", menunjukkan betapa pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi jumlah sampah dan mengelola tumpukan sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat .

Sulawesi Barat memiliki 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene. Masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat terbatas dan kurang partisipasinya. Ini dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada

musim hujan. Selain sampah rumah tangga dan juga sampah yang berasal dari aktivitas kegiatan pada Kawasan tertentu di Sulawesi Barat belum dikelola secara maksimal sehingga menimbulkan timbulan sampah yang sangat mengganggu terhadap lingkungan. Kabupaten Polewali Mandar merupakan penghasil sampah terbanyak di Sulawesi Barat dengan timbulan sampah sebanyak 64,616 ton per tahun. Berdasarkan LAKIP DLHK Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, target proporsi sampah yang tertangani sebesar 75,03% sedangkan realisasinya sebesar 67,73% atau hanya sebesar 21.424 ton/tahun. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah timbulan sampah. Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan sampah 2,852,712 ton/tahun dan hanya 31% sampah saja yang manpu di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Disamping itu sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum tersedia sebagaimana kebutuhan dan produk sampah yang ada. Hal tersebut tentunya memerlukan peran dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir dalam pengelolaan sampah. Maka Bank sampah adalah salah satu alternatif dalam mengatasi peningkatan timbulan sampah dalam Kawasan perumahan dan permukiman oleh masyarakat lokal dalam upaya partisipasi penanganan permasalahan sampah. Bank sampah merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan akan mengurangi sampah. Pelaksanaan bank sampah pada perinsipnya merupakan salah satu upaya rekayasa social untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan, terutama dalam pemilahan sampah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabutapen Polewali Mandar memiliki program “Zero Sampah” yang merupakan salah satu program dari bank sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun cara pelaksanaanya menukar sampah daur ulang dengan Sembilan bahan pokok (sembako) guna mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Program ini dilaksanakan mulai bulan mei 2023 sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dengan salah satu misi RPJMD yaitu “ Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi dengan berwawasan lingkungan”, dan dijabarkan lebih lanjut pada tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dikutip dari berita online Beritasatu Polewali Mandar Plt Kadis DLHK Polman, Agusnia Hasan Sulur menjelaskan bahwa Program ini merupakan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah yang akan bernilai ekonomis dan baru direalisasikan pada bulan Mei 2023 . Melalui proses pemisahan sampah rumah tangga yang beragam untuk dibungkus oleh warga dan lalu di bawa ke kantor DLHK yang berada di Jl Kartini, Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali untuk kemudian diterima dan ditimbang oleh petugas Bank Sampah Sipamandaq Polman. (Asyharuddin, 2023)

Program dari bank sampah dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menarik antusias warga untuk menumbuhkan efek ekonomi yaitu menukarkan sampahnya dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula hingga rokok yang dapat ditukarkan langsung di bank Sampah DLHK.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MELALUI PROGRAM “ZERO SAMPAH” DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Polewali Mandar merupakan penghasil sampah terbanyak di Sulawesi Barat dengan timbulan sampah sebanyak 64,616 ton per tahun. Berdasarkan LAKIP DLHK Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, target proporsi sampah yang tertangani sebesar 75,03% sedangkan realisasinya sebesar 67,73% atau hanya sebesar 21.424 ton/tahun. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah timbulan sampah. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Disamping itu sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum tersedia sebagaimana kebutuhan dan produk sampah yang ada. Hal tersebut tentunya memerlukan peran dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar dikenal dengan motto Polman Berhias, yang berarti bersih, rapih, indah, aman dan asri. Namun, disatu pihak masih adanya masalah penimbunan sampah sehingga bertentangan dengan motto Polman Berhias yang menunjukkan gambaran buruknya tata kelola persampahan di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun perkiraan permasalahan yang ada berdasarkan pengamatan dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Belum ada tindakan prioritas yang saling memperkuat untuk mengurangi timbulan sampah pada skala lingkungan desa, kecamatan, dan perbatasan wilayah.
2. Belum ada inisiatif pengelolaan sampah untuk dijadikan bahan baku pupuk kompos di masyarakat desa.
3. Sosialisasi sanitasi pada tingkat rumah tangga belum optimal, khususnya di pedesaan, karena pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup sehat belum menjadi kebutuhan rumah tangga dan lingkungan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar” oleh (Yulia, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar dengan upaya dapat meningkatkan mutu pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Ketetapan sasaran dan tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal dalam menunjang lingkungan bersih, sehat dan tertata rapi dikarenakan hanya beberapa gampong dari 16 kecamatan yang mengikuti kerjasama dengan DLH dalam pengelolaan sampah.

Kedua, Penelitian yang berjudul “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Bank Sampah Malang)” dilakukan oleh (Suryani, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Efektivitas dalam Peran Bank Sampah untuk Pengelolaan Sampah di Malang dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah. Adapun hasil dari penelitian ini Program pengelolaan sampah mandiri melalui bank sampah, telah menjadi alternative solusi bagi pemerintah dan masyarakat Malang.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah” dilakukan oleh (Ardiansyah, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhinya. Adapun hasil dari penelitian ini yakni temuan data di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah selama ini sangat baik dalam menanganinya. Hal ini dapat dilihat dari respon dan kesigapan pegawai dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh (Silfiah et al., 2021) dengan judul Digitalisasi Bank Sampah Dengan Penerapan Sistem Aplikasi Resik Di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, menemukan Praktik bank sampah sudah berjalan di Desa Karangsono Sukorejo Pasuruan secara manual sejak tahun 2019 dengan nama Bank Sampah "Hasil Karya". Universitas Yudharta Pasuruan melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata SDGs 2021 telah mengenalkan serta mengajak masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk menggunakan sistem aplikasi bank sampah untuk menyempurnakan keberadaan bank sampah yang telah ada. Digitalisasi pengolahan sampah dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mampu mengubah pemikiran terhadap sampah yang seakan tidak memiliki nilai ekonomi.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh (Tiawan et al., 2023) yang berjudul Digitalisasi Bank Sampah Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Sampah Dan Pendayagunaan Masyarakat Di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, menemukan bahwa Bank Sampah Digital merupakan sebuah aplikasi yang memuat saldo sampah yang telah ditukarkan oleh penduduk ke bank sampah dan saldo tersebut akan dapat ditukarkan setiap 6 bulan sekali dalam bentuk sembako dan pupuk kompos. Serta Sosialisasi tentang pemilahan sampah dan pendayagunaan sampah yang akan dapat membangun penduduk desa pejaten lebih paham tentang penambah nilai guna dari sampah setelah dipilah.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh (Mubarakh et al., 2020) yang berjudul Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang, menemukan bahwa penanganan pengelolaan sampah di Kota Serang masih berjalan kurang maksimal. Program yang sudah direncanakan masih terdapat beberapa hambatan, serta proses pengawasan terhadap sampah liar masih belum berjalan dengan baik dan ketersediaan anggaran masih dirasa belum mencukupi untuk penanganan permasalahan sampah di Kota Serang. Sehingga membuat masyarakat Kota Serang masih belum mengetahui cara mengelola sampah dengan baik.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh (Asteria, 2015) dengan judul Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya menemukan Bank Sampah Pucuk Resik (BSPR) di Kampung Karangresik ini telah memberikan manfaat kepada warga, terutama manfaat langsung dengan berkurangnya timbulan sampah di komunitas, lingkungan menjadi lebih bersih dan asri, serta kemandirian warga secara ekonomi. Selain manfaat secara ekonomi, dimana dari tabungan sampah memperoleh uang untuk membayar listrik dan membeli sembako, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang lebih bersih, hijau, nyaman, dan sehat. Pengelolaan sampah terintegrasi dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi dari masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh (Sutjahjo et al., 2015) yang berjudul Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan, menemukan bahwa responden mempunyai persepsi positif dan partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor internal dan eksternal individu dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga juga berhubungan signifikan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh (Prayati et al., 2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Pendapatan Nasabah Bank Sampah di Kota Denpasar, menemukan bahwa secara simultan partisipasi nasabah, tabungan sampah dan hasil penjualan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah bank sampah, sedangkan secara parsial partisipasi nasabah tidak berpengaruh signifikan dan tabungan sampah, hasil penjualan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah bank sampah di Kota Denpasar.

Kesepuluh, Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Cahyani et al., 2021) dengan judul Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa, menemukan bahwa penelitian tersebut adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja tidak maksimal karena tidak tercapainya tujuan pengurangan sampah, tidak terpenuhinya Adipura, dan jadwal pengolahan sampah yang tidak terpenuhi dan tidak dipatuhi. Kualitas pelayanan cukup baik dilihat dari kedisiplinan dan keramahan petugas, namun perlu dilakukan penambahan alat berat, tempat sampah dan renovasi tempat pembuangan sampah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan lebih berfokus kepada kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pengelolaan Sampah.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Melalui Program “Zero Sampah” Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Melalui Program “Zero Sampah” Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Melalui Program “Zero Sampah” Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Menurut (Darmadi, 2011) pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dalam suatu penelitian diperlukan pendekatan penelitian untuk menentukan metode yang dipakai untuk mempermudah mendapatkan tujuan dari penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Polewali Mandar serta melakukan survey di beberapa tempat yang ada. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan “*Field research approach*” atau peneliti melakukan penelitian secara langsung pada lokasi penelitian menggunakan pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur karena sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipatif sebagai acuan peneliti dalam menggunakan teknik observasi. Teknik observasi nonpartisipatif dilakukan guna menyempurnakan teknik wawancara yang telah dilakukan dalam pencarian informasi terkait pemecahan masalah sesuai yang dibutuhkan peneliti. peneliti dalam melakukan teknik dokumen, peneliti melampirkan pedoman dokumen sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Teknik dokumen dilakukan guna menyempurnakan teknik wawancara dan teknik observasi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Teknik Analisis Data menggunakan teknik Miles dan Huberman dalam (Simangunsong, 2017) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Melalui Program “Zero Sampah” Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Penulis menganalisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program “Zero Sampah” di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dari segi landasan teoritik menggunakan pendapat dari Soesilo dalam (Nogi, 2005) berpendapat kinerja suatu organisasi dapat diukur melalui 5(lima) dimensi yaitu: Organisasi, Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen, dan Sarana Prasarana. Dan dari segi landasan Legalistik menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang terdiri dari dua dimensi yakni: Penanganan sampah dan Pengurangan sampah.

A. Landasan Teoritik

1. Organisasi

Dalam organisasi, salah satu kriteria yang penting ditunjukkan melalui rumusan indikator yang mampu mencerminkan apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator tersebut mutlak diperlukan. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 menjadi dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. yang merupakan salah satu payung hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.

1) Tujuan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar berharap timbulan sampah akan berkurang sehingga masyarakat tidak mengalami masalah persampahan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah mencapai 2,394,492 ton pertahun, tahun 2020 mencapai 2,402,820 ton pertahun, tahun 2021 mencapai 2,791,020 ton pertahun. dan pada tahun 2022 mencapai 2,852,712 ton pertahun (sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar). Dengan observasi yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa untuk mengurangi timbulan sampah yang ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar haruslah lebih teliti dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat betapa pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

2) Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar yakni meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan. Dalam menjamin guna meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjabarkan hal tersebut di Renstra tahun 2019 – 2024 yang berlandaskan pada persentase penanganan persampahan yang dapat dilihat dari target dari tahun ke tahunnya. Pada persentase penanganan persampahan tahun 2019 mencapai 73,09%, tahun 2020 mencapai 74%, tahun 2021 mencapai 75,03%, tahun 2022 mencapai 74,14 %, dan tahun 2023 mencapai 73,04%. yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 1,99 %. Dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan baik namun belum optimal yang dapat dilihat dari persentase penanganan persampahan dari tahun ke tahun terus menurun dikarenakan sampah yang di di tangani atau di kelola sudah banyak mengalami penurunan jadi tingkat pengelolaannya juga menurun yang hasil ini tidak terlepas dari penyelenggaraan pengelolaan lingkungan, pengawasan, dan peningkatan SDM yang dapat mengubah kualitas lingkungan menjadi lebih baik.

3) Strategi

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar meningkatkan pengelolaan persampahan melalui peningkatan kerja sama dalam bentuk kemitraan pengelolaan persampahan dan pembinaan persampahan adalah salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.

Program Zero Sampah merupakan sebagai salah satu bentuk strategi pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah yang akan bernilai ekonomis dan baru direalisasikan pada bulan Mei 2023 . Melalui proses pemisahan sampah rumah tangga yang beragam untuk dibungkus oleh warga dan lalu di bawa ke kantor DLHK yang berada di Jl Kartini, Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali untuk kemudian diterima dan ditimbang oleh petugas Bank Sampah Sipamandaq Polman.

Tabel 3. 1 Pembelian Sampah Anorganik Bank Sampah Induk Sipamandaq

Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah sampah	
		Kg	Rp
Januari	14	633	288.800
Februari	6	133	110.275
Maret	8	442	145.475
April	1	52	26.000
Mei	33	985	664.255
Juni	92	1.710	1.325.250
Juli	137	4.509	2.789.470
Agustus	145	5.067	6.070.677
Oktober	105	9.375	9.012.940

Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah sampah	
		Kg	Rp
November	120	9.485	9.234.777
Desember	133	9.678	9.475.858
Total	794	42.069	39.143.777

Sumber: Bank Sampah Induk Sipamandaq 2023

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, data administrasi wilayah Bank Sampah Induk Sipamandaq, terhitung pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2023, Bank Sampah Induk Sipamandaq dibawah kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menghasilkan 670 kg sampah. Namun sejak terealisasikan program Zero Sampah pada bulan Mei 2023, sampah yang ditimbang dan dicatat mencapai 985 kg hanya dengan satu bulan. Program ini menarik masyarakat dengan ditukarnya sampah dengan barang yang bernilai ekonomis. Dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan terlihat bahwasanya penetapan strategi dalam mewujudkan program yang telah ditetapkan sudah relevan terhadap anggaran dan realisasinya dalam pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang tidak dapat terlepas juga dari pengawasan, akuntabilitas dan monitoring.

2. Kebijakan

1) Visi dan Misi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024. Meningkatnya timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Amola merupakan sebuah tantangan serius dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021-2024, yaitu "Rakyat Sejahtera". Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif. Kemudian berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Polewali Mandar, maka misi yang terkait adalah Misi ketiga yaitu: Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan, yang dimana sasaran dari misi ini dapat mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan terlihat bahwasanya DLHK dalam mengukur kinerja organisasi dalam mencapai visi dan misi terkait pengelolaan sampah, beberapa indikator kinerja yang relevan dapat dipertimbangkan, antara lain pengurangan timbulan sampah Dengan memantau dan mengevaluasi kinerja DLHK pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana pencapaian visi dan misi tersebut terkait pengelolaan sampah, serta membuat perencanaan dan penyesuaian strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Kualitas Karyawan dan Karya yang Optimal

Dengan kualitas sumber daya aparatur yang memadai, DLHK memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan

kualitas sumber daya manusia, pelatihan, dan pengembangan karir dapat menjadi strategi penting bagi DLHK untuk mencapai tujuan-tujuan organisasionalnya dengan lebih efektif.

Untuk memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan, organisasi melakukan evaluasi kinerja organisasi. Berdasarkan ukuran kinerja organisasi dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, kelestarian lingkungan hidup dinilai harus ditingkatkan.

Tabel 3. 2 Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar

No.	Komponen Survei	Nilai Survei		
		Layanan Pengaduan	Layanan Izin Lingkungan	
1	Kejelasan persyaratan	82,02	80,20	
2	Kesederhanaan Prosedur	78,33	81,30	
3	Kecepatan respon layanan	78,48	81,30	
4	Etika pelayanan	82,31	85,20	
Indeks Kepuasan		80,29	82,00	
Rata-Rata IK		81,14		
Predikat Kinerja Layanan				
	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
	25 - 43,75	43,76 - 62,50	62,51 - 81,25	81,26 - 100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2023

Mencermati Tabel 3.2 terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat atau stakeholders atas beberapa jenis layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 mencapai indeks 80,97 atau predikat kinerja layanan “Baik”. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu Predikat Baik. Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2023 ini meningkat dibanding Tahun 2022 nilai kepuasan berada di indeks 81,13. Selanjutnya, capaian tahun 2023 ini menunjukkan sudah tercapai 90,2 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022-2024. Program *Zero Sampah* yang diperkenalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari dukungan aparatur dan karyawan DLHK yang berperan penting dalam implementasi dan keberlanjutan program tersebut. Aparatur karyawan DLHK berfungsi sebagai tulang punggung dalam menjalankan program tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap setiap tahapan program. Mereka memiliki peran dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan infrastruktur yang

diperlukan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Dukungan dan komitmen aparaturnya sangat vital dalam memastikan keberhasilan program *Zero Sampah* dan pengelolaan sampah secara keseluruhan di Kabupaten Polewali Mandar. Dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan bahwasanya dalam ukuran kinerja organisasi dapat terlihat dari seberapa besar pencapaian yang dilakukan oleh instansi terkait apakah sudah memenuhi dari capaian yang diinginkan dan bagaimana untuk target kedepannya, agar masyarakat dapat melihat kinerja dari instansi tersebut dan dapat memberikan penilaian yang baik.

4. Sistem Informasi Manajemen

1) Pengelolaan Data Base

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan operasional sehari-hari terkait sampah. Melalui sistem ini, DLHK dapat memantau dan mengelola seluruh siklus hidup sampah, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir, dengan lebih efisien dan efektif. Sistem ini memungkinkan DLHK untuk melacak volume sampah yang terkumpul, mendistribusikan sumber daya dengan lebih baik, dan merencanakan kegiatan pengelolaan sampah secara tepat waktu. Selain itu, sistem informasi manajemen juga memfasilitasi pelaporan dan analisis data yang komprehensif, membantu DLHK dalam mengidentifikasi tren, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan strategis untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Dengan penerapan teknologi informasi ini, DLHK dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan. dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan maka dapat diartikan bahwasanya dalam penerapan sistem informasi yang dilakukan DLHK sudah memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh Aparatur dan keryawan DLHK karena data ataupun informasi yang diberikan melalui website <https://dinaslingkunganhidup.polmankab.go.id/> sehingga masyarakat dapat melihat kinerja dari instansi tersebut dan dapat memberikan penilaian sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tentang penanganan persampahan .

5. Sarana Prasarana

1) Infrastruktur dan Pemeliharaan

Dalam mendindaklanjuti pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pencapaian Dinas pada tahun 2023 antara lain:

1. Jumlah timbulan sampah yang terkelola sebesar 16.191,42 ton/bulan.
2. Jumlah armada sebanyak 21 armada, yang terdiri dari dump truck sampah sebanyak 15 unit, sepeda sampah sebanyak 1 unit, excavator sebanyak 2 unit, dozer mini 1 unit, loader 1 unit, dan mobil penyapu jalan sebanyak 1 unit.
3. Jumlah pemeliharaan kendaraan sebanyak 21 armada yang harus tetap dijaga dengan baik.
4. Jumlah BBM yang harus dikeluarkan yakni 83.230 Liter

Volume timbulan sampah setiap harinya 40 ton, untuk meningkatkan Volume pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.840.470.967,- untuk pengelolaan penanganan persampahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Binuang dengan luas sebesar 5 Ha. Tahun 2023 target proporsi sampah yang tertangani sebesar 99,04% sedangkan realisasinya sebesar 12,68%. Penurunan ini secara signifikan diakibatkan oleh masih tertutupnya Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang mengakibatkan tidak terkelolanya dengan baik sampah dan mengakibatkan jumlah sampah yang tertangani menurun namun tidak lepas dari peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang semakin meningkat dan juga sarana/ prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan sesuai dengan observasi yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwasanya situasi di mana proporsi sampah yang tertangani jauh di bawah target yang ditetapkan menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan sampah. Penyebab utama penurunan tersebut adalah tertutupnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sampah dan penurunan jumlah sampah yang tertangani.

B. Landasan Legalistik

1. Pengurangan Sampah

1) Pembatasan Timbulan Sampah

Pembatasan produksi sampah adalah langkah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari tahap pra-produksi hingga pemakaian produk atau kemasannya. Dalam upaya menghadapi tantangan ini di Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Daerah yakni Bupati Polewali Mandar, telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah dengan membatasi penggunaan kantong plastik, wadah, dan kemasan makanan atau minuman berbahan plastik di Kabupaten Polewali Mandar.

2) Pendaauran Ulang Sampah

DLHK melalui program *Zero* Sampah tidak hanya menukarkan sampah dengan barang bernilai ekonomis, tetapi juga mendaur ulang kembali sampah yang telah ditukarkan menjadi kerajinan tangan. Contoh kerajinan yang dibuat adalah tas, bunga hias, bahkan paving blok. Proses daur ulang ini merupakan langkah penting dalam upaya untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan mempromosikan praktik daur ulang yang ramah lingkungan. Dengan mendaur ulang kembali sampah menjadi kerajinan tangan, DLHK tidak hanya mengurangi dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

3) Pemanfaatan Kembali

Dalam pemanfaatan kembali sampah, Bank Sampah Induk Sipamandaq dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar memberikan inovasi berupa program *Zero* sampah dimana sampah yang ditukarkan dengan barang bernilai ekonomis, yang harga persampah berbeda beda tergantung jenis nya. Sampah yang telah di pilah sehingga dapat ditukarkan dan mempermudah pengelola bank sampah untuk menukarkan sampahnya dengan sembako ataupun uang. Sampah-sampah yang ditukarkan

akan di catat melalui buku tabungan sampah dan biasanya warga akan mengambil atau menukarkan hasil dari tabungan sampahnya dengan Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) atau uang sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab

2. Penanganan Sampah

1) Pemilahan Sampah

Bank Sampah Induk Sipamandaq dibawah kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilah sampah yang dibawa oleh nasabah perorangan untuk ditukarkan dengan barang bernilai ekonomis. Program *Zero* sampah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan dan pemilahan sampah. Bank Sampah menjadi salah satu elemen utama dalam sistem. Pemilahan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah plastik, sampah karton dan sampah besi. Proses pemilahan ini membantu dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau bahkan sampah yang mencemari lingkungan.

2) Pengumpulan Sampah

Dalam pengumpulan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar bahwa timbulan sampah perharinya dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 3. 3 Data Harian Timbulan Sampah Tahun 2023

NO.	BULAN	JUMLAH	RITASI	JUMLAH (Kg) /		TON / PER-HARI
		PER-HARI		PER-BULAN	PER-HARI	
1	JANUARI	3 S/D 31	221	502.273	16.202	16
2	FEBRUARI	1 S/D 28	438	997.847	35.637	36
3	MARET	1 S/D 31	122	277.306	8.945	9
4	APRIL	1 S/D 30	443	1.007.813	33.594	34
5	MEI	1 S/D 31	314	709.176	22.877	23
6	JUNI	1 S/D 30	527	1.193.841	39.795	40
7	JULI	1 S/D 31	523	1.188.779	38.348	38
8	AGUSTUS	1 S/D 29	425	965.622	31.149	31
9	SEPTEMBER	1 S/D 30	475	1.079.675	34.828	35
10	OKTOBER	1 S/D 31	225	511.425	16.498	16
11	NOVEMBER	1 S/D 30	197	446.169	14.393	14
12	DESEMBER	1 S/D 31	289	661.559	21.341	21
JUMLAH		181 Hari	4.199	9.541.485	313.606	314

Sumber: DLHK Kabupaten Potewali Mandar tahun 2023

Pada Tabel 3.3 diatas menunjukkan adanya fluktuasi dalam volume sampah yang terkumpul setiap hari, dilihat dari naik turunnya timbulan sampah setiap bulannya. Yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musiman, aktivitas masyarakat, dan kegiatan sosial atau acara tertentu. Meskipun demikian, DLHK terus berupaya untuk memantau dan menyesuaikan strategi pengumpulan sampah mereka agar dapat mengatasi fluktuasi ini secara efisien dan memastikan bahwa semua sampah terkelola dengan baik sesuai dengan standar kebersihan lingkungan.

3) Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah tindakan mengambil sampah dari sumber atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan kendaraan bermotor atau non-bermotor yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Di Kabupaten Polewali Mandar, tidak ada TPA yang tersedia karena telah ditutup oleh masyarakat pada tahun 2021. Kondisi ini mengakibatkan kendala dalam proses pengangkutan sampah, menyebabkan sampah tersebar di sekitar jalan. Pengangkutan sampah di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan oleh petugas persampahan menggunakan kendaraan seperti motor yang dimodifikasi atau truk. Biasanya, proses ini dilakukan pada pagi hari mulai pukul 08.30 hingga selesai. Sampah yang terkumpul akan dibawa ke tempat pembuangan yang telah disediakan.

Dengan Program *Zero* Sampah, pengangkutan sampah akan dilaksanakan setiap hari rabu, setiap minggunya. Sama halnya dengan pengangkutan dilakukan oleh petugas persampahan menggunakan kendaraan seperti motor yang dimodifikasi atau truk.

4) Pemrosesan Akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah adalah langkah terakhir dalam mengelola sampah, di mana sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya dibuang ke lingkungan dengan aman. Mengingat TPA telah ditutup oleh masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah membuat tempat pembuangan sendiri menggunakan metode sanitary landfill. Metode ini dipilih sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tumpukan sampah. *Sanitary landfill* merupakan sistem pemrosesan atau penguburan sampah di area cekung yang telah disiapkan dengan menggunakan *excavator*, kemudian menutupnya dengan lapisan tanah untuk memadatkannya.

Dalam pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar bahwa timbulan sampah perbulannya dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 4. 1 Data Bulanan Timbulan Sampah Tahun 2022

No	Indikator	Target		Capaian	
		TON	(%)	TON	(%)
1	Timbulan sampah	66.260		71.402,18	
2	Pengurangan	17.227,60	26	12.549,64	17,58
3	Penanganan	48.369,80	73	12.268,27	17,21

Sumber: DLHK Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2023

**)71.402,18 (Jumlah penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita

Tabel 4. 2 Data Bulanan Timbulan Sampah Tahun 2023

No	Indikator	Target		Capaian	
		TON	(%)	TON	(%)
1	Timbulan sampah	67.055		71.402,18	
2	Pengurangan	18.104,85	27	13.782,59	19,30
3	Penanganan	48279,60	72	6.433,49	9,01

Sumber: DLHK Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022-2023

3.2 Faktor Penghambat

Dalam upaya untuk mencapai tingkat pengelolaan sampah yang efektif dan efisien di Kabupaten Polewali Mandar, terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi berdasarkan informasi dari observasi dan wawancara dengan berbagai informan terkait. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar.

1. Faktor Internal

- 1) Sistem Pengumpulan dan Pemilahan Sampah: Diperlukan infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan dan pemilahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memastikan bahwa sistem pengumpulan sampah mencakup semua wilayah di Kabupaten Polewali Mandar dan bahwa proses pemilahan sampah dilakukan secara efisien
- 2) Ketersediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah: Diperlukan fasilitas pengolahan sampah yang memadai untuk mengolah sampah menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memastikan bahwa infrastruktur ini tersedia dan beroperasi dengan baik.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Diperlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja program "Zero Sampah" untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan memastikan bahwa program ini berjalan secara efisien dan efektif.
- 4) Penutupan Tempat Pembuangan Akhir sampah oleh masyarakat dilingkungan sekitarnya yang telah membangun rumah dan dijadikan kawasan permukiman di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

2. Faktor External

- 1) Partisipasi Masyarakat: Keberhasilan program "Zero Sampah" sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah, maka semakin berhasil guna program ini dilaksanakan di masyarakat

3.3 Upaya Yang Dilakukan

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar untuk menghadapi faktor penghambat dalam Pengelolaan Sampah yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar berupa uapaya langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

1. Upaya Langsung

- 1) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan tujuan dan prinsip yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah.

- 2) Konstruksi Tempat Pembuangan Akhir yang baru di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- 3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan guna mendukung efisiensi pengelolaan sampah.
- 4) Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pengelolaan sampah.
- 5) Memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

2. Upaya Tidak Lansung

- 1) Penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia pada tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Ketetapan sasaran dan tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal dalam menunjang lingkungan bersih, sehat dan tertata rapi dikarenakan hanya beberapa gampong dari 16 kecamatan yang mengikuti kerjasama dengan DLH dalam pengelolaan sampah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Anih Sri Suryani pada tahun 2014 dengan penelitian yang berjudul “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Bank Sampah Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Efektivitas dalam Peran Bank Sampah untuk Pengelolaan Sampah di Malang dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah. Adapun hasil dari penelitian ini Program pengelolaan sampah mandiri melalui bank sampah, telah menjadi alternative solusi bagi pemerintah dan masyarakat Malang.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Ardiansyah pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah”. Adapun hasil dari penelitian ini yakni temuan data di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah selama ini sangat baik dalam menanganinya. Hal ini dapat dilihat dari respon dan kesiapan pegawai dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Pembaharuan temuan penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yakni Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program “Zero Sampah” di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan teori dari Soesilo Dalam (Nogi,2005) pengelolaan sampah masih belum optimal dikarenakan belum mencapai tujuan, visi dan misi, serta target kinerja yang ditetapkan DLHK Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yang dihadapi seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, tertutupnya TPA, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah hingga masyarakat, dan tidak ada sanksi yang tegas. Oleh karena itu diharapkan DLHK Kabupaten Polewali Mandar berupaya untuk mengatasi kinerja pengelolaan sampah seperti memanfaatkan pemberdayaan masyarakat, membuat TPA baru, penambahan anggaran, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kerjasama, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

IV. KESIMPULAN

1. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola sampah melalui program "Zero Sampah" telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan praktik daur ulang dengan bertambahnya jumlah nasabah pada bank sampah serta tumbuhnya bank sampah di kecamatan lainnya. Untuk pengangkutan sampah basah lainnya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah sehingga masalah persampahan di Kabupaten Polewali Mandar . Sehingga masalah persampahan di Kabupaten Polewali Mandar saat ini telah dapat diatasi dengan baik. Atau dengan kata lain kinerja Aparatur dan Karyawan DLHK semakin meningkat.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan sampah adalah belum tersedianya tempat pembuangan akhir yang representatif dari berbagai kajian dan peraturan yang mengikat kepada semua tentang persampahan dan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.
3. Upaya DLHK Kabupaten Polman berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan cara memanfaatkan partisipasi masyarakat, sosialisasi manfaat bank sampah mengadakan lokasi dan membangun Tempat Pembuangan Akhir , memperkuat kerjasama, dan membuat peraturan daerah tentang sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 14 hari untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta membuat solusi permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, dikarenakan waktu penelitian yang singkat peneliti keterbatasan untuk menjangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini diperuntukkan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat mengatasi masalah persampahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, D. (2016). Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 188–198.
- Asteria, D. 2015. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya". *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 23, No.1, (2016)
- Asyharuddin, M. (2023). *Warga Polman Tukar Sampah dengan Sembako*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1047369/warga-polman-tukar-sampah->

dengan-sembako

Dwi Cahyani, Putri, and Abdul Kadir Adys. 2021. "Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gowa". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol 2, No. 5 (2023)

Mubarakh, Yulianti, Yusuf. 2020. "Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 5 (2020)

Nogi, H. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Grasindo.

Nogi, H (2005). *Manajemen Publik*. PT. Grasindo

Nugraha, A, Sutjahjo, S, Amin, A. "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan", Vol. 8, No.1, (2018)

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018.
Perubahan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar

Prayati N, Kartika I. 2018. "Analisis Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Pendapatan Nasabah Bank Sampah di Kota Denpasar", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.7, No.6 Juni 2018

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2023

Silfiah, Mohtarom, Ulum. 2021. "Digitalisasi Bank Sampah Dengan Penerapan Sistem Aplikasi Resik Di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks*, Vol. 4, No. 2 (2021)

Simangunsong, F. (2017). *Merode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

SIPSN. (2022). *Data Timbulanan Sampah Indonesia*. KEMENTERIAN LINGKUNGA
HIDUP DAN KEHUTANAN.
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Suryani, A. S. (2017). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>

Tiawan, Kusuma, Hematang. 2023. "Digitalisasi Bank Sampah Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Sampah Dan Pendayagunaan Masyarakat Di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2023)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Yulia, R. M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. In *Skripsi*